

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga diperlukan mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak negara. Kajian hubungan internasional muncul melalui proses interaksi sosial antar aktor-aktor internasional. Interaksi ini nantinya akan menggambarkan pola hubungan antara aktor-aktor internasional yang terlibat didalamnya. Dalam perkembangannya, negara merupakan aktor internasional pertama. Hingga saat ini, negara mewakili hampir semua aspek dan pola interaksi dalam hubungan internasional. Interaksi antar negara ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, ketegangan berupa konflik antar negara yang bahkan dapat berujung pada perang.

Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negaranegara di dunia. Pasca perang dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) (Perwita dan Yani, 2005:7).

Menurut P. Anthonius Sitepu dalam bukunya Studi Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

“Hubungan internasional senantiasa berhadapan dengan manifestasi baru dalam dimensi politik internasional, yakni pola interaksi hubungan antar negara-negara. Dalam pola interaksi hubungan tersebut, terlihat berbagai kecenderungan dari negara-negara terutama negara-negara besar yang melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil dan pada gilirannya, memberikan kesan bahwa telah terjadi sifat hubungan yang kompetitif dan ini akan berpengaruh kepada *politico interest* dan akan terus berkembang menjadi konflik” (Sitepu, 2011: 7).

P. Anthonius Sitepu mengungkapkan bahwa pola interaksi hubungan antar negara-negara cenderung melakukan dominasi terutama negara-negara besar ke negara-negara kecil. Dominasi ini membuat masing-masing negara bertindak untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya yang kedepannya akan berkembang menjadi konflik yang akan mungkin terjadi diantara negara-negara sekurang-kurangnya berskala regional dan berkaitan dengan seluruh dunia.

Kepentingan ini tercipta dari sebuah kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari oleh suatu '*power*' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung untuk memperoleh pengakuan dunia.

Istilah hubungan internasional secara umum dapat didefinisikan bahwa hubungan internasional itu mengacu terhadap hubungan yang terjadi antar pemerintah di dunia yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa. Berkaitan erat dengan aktor-aktor lain seperti Organisasi Internasional, korporasi internasional dan individu-individu dengan struktur sosial yang lain mencakup

ekonomi, kebudayaan dan politik domestik serta pengaruh-pengaruh geografis maupun historisnya (Goldstein, 2002: 3).

Interaksi internasional tidak saja terjadi oleh satu interaksi tetapi oleh beberapa interaksi dari negara-negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasional dari negaranya masing-masing. Bila suatu aktor negara melakukan suatu hubungan dalam dunia internasional, negara tersebut melakukan sebuah interaksi yang disebut Interaksi Internasional. Pola interaksi ini didasarkan karena adanya hubungan antara negara dengan dunia internasional dimana negara tersebut perlu mengakomodasi kepentingan-kepentingannya di lingkup internasional tersebut.

Dalam interaksi internasional, terbentuk suatu interaksi yang berdasarkan kepada banyaknya pihak yang melakukan hubungan tersebut, antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral atau internasional. Pola-pola yang terbentuk dalam proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan dari pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut, yang dapat dibedakan menjadi sebuah pola kerjasama, pola persaingan, dan pola konflik (Perwita dan Yani, 2005 : 42).

Perkembangan ilmu hubungan internasional saat ini adalah sebagai ilmu yang mandiri (*a real distinct dicipliner*), kemandirian ini yang menjadikan ilmu hubungan internasional menjadi “*new comer*” dalam ilmu sosialn lainnya, usaha dalam memunculkan kemandirian ini merupakan suatu proses keilmuan yang panjang. (Darmayadi, 2015 : 10).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Hubungan internasional selalu berkaitan dengan beberapa hal yaitu *actor*, *interest* dan *power*. Ketiga hal tersebut merupakan esensi utama dari hubungan internasional yang tidak dapat dipisahkan. Aktor adalah pelakunya dan segala tindakan aktor bertujuan untuk mencapai kepentingannya. *Power* dibutuhkan oleh setiap aktor untuk dapat memperoleh kepentingannya. Pada dasarnya kepentingan merupakan salah satu esensi yang sangat penting, karena tanpa adanya kepentingan yang akan dicapai maka tidak akan ada tindakan dari para aktor dan *power* sebuah negara tidak akan digunakan.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional” mendefinisikan kepentingan nasional negara sebagai berikut:

“Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara” (Perwita dan Yani, 2014: 35).

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai “Kepentingan Nasional”.

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu samalain dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, karakter, budaya, bahkan

sejarah negara membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.

Konsep kepentingan nasional mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep '*power*' kepentingan '*interest*' didefinisikan ke alam terminologi *power* (Sitepu, 2011: 56).

Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama (Sitepu, 2011: 165).

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara

yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi *internalnya*, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *power* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dalam penelitian ini, yang menjadi kepentingan nasional Indonesia adalah meningkatkan sektor pariwisata Indonesia melalui penyelenggaraan *event* Asian Games 2018.

2.1.3 Diplomasi

Diplomasi merupakan suatu istilah yang memiliki pengertian berbeda bergantung dari pengguna dan penggunaannya. Dalam dunia politik, diplomasi mengacu pada proses komunikasi antara aktor-aktor internasional yang berusaha menyelesaikan konflik atau permasalahan melalui proses negosiasi (White, 2001:388).

Kadang kala istilah diplomasi disamakan dengan hubungan internasional atau masalah-masalah dunia (*international relations and world affairs*), hubungan-hubungan luar negeri (*foreign relations*), cara melakukan hubungan luar negeri (*conduct of foreign relations*), implementasi politik luar negeri

(*implementation of foreign policy*), komunikasi (*officials communications*) dan negosiasi (*negotiation*). Diplomasi sering dipandang sebagai suatu identitas dari hubungan internasional, tetapi perhatiannya lebih ditekankan pada kejadian-kejadian atau penyebab peristiwa, kebijakan, hasil politik dan lain lain sehingga pemahamannya tidak dapat disejajarkan dengan hubungan internasional secara menyeluruh. Jika dianggap diplomasi itu sejajar dari hubungan luar negeri, hubungan-hubungan itu memiliki dua komponen yaitu kebijakan luar negeri dan tatacara hubungan luar negeri.

Diplomasi lebih dekat kepada tatacara hubungan luar negeri (*conduct of foreign policy*) dari pada kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Diplomasi dianggap sebagai implementasi kebijakan luar negeri yang mengandung pengertian bahwa maksud dari diplomasi adalah bukan pada kebijakannya atau pembuat kebijakan tersebut. Diplomasi adalah metode utama yang membuat suatu politik luar negeri dijalankan, suatu cara dan prosedur negara-negara bangsa untuk melakukan urusan politik dan urusan lain mereka pada masa damai (Wijatmadja, 2016: 147).

Diplomasi dapat dipahami dalam dua perspektif besar pada kaitannya dengan politik dunia. Perspektif pertama yaitu perspektif makro. Perspektif makro mencoba untuk memahami politik dunia secara keseluruhan, apa saja bagian-bagian penyusunnya, dan bagaimana mereka dapat tersusun bersama-sama. Melalui perspektif makro diplomasi dipandang secara umum sebagai hubungan negara dan sebagai proses global. Sedangkan yang kedua dalam perspektif mikro, diplomasi dipahami sebagai wawasan perilaku aktor dalam sistem global.

Diplomasi lebih didefinisikan sebagai instrument kebijakan dalam mencapai kepentingannya dibandingkan sebagai proses global.

Melalui peran media massa, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa sebuah halangan birokratis. Peran media massa telah menegaskan ide “diplomasi tanpa diplomat”. Perkembangan lain adalah peranan media massa dalam mengatur mekanisme diplomasi. Media sering kali dianggap sebagai sebuah penunjang maupun sebuah penghambat (Surya, 2011: 58).

Media dan opini publik merupakan suatu hal yang penting dalam urusan-urusan Internasional dan menjadi intensif bagi para pemimpin untuk semakin memperlihatkan diri di depan konstituennya sebagai bagian dari upaya propaganda. Diplomasi pada tingkat tertinggi ini semakin dipolitisasi dimana parlemen menginginkan informasi mengenai kebijakan luar negeri secara rinci (Surya, 2011 : 52).

Diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan merupakan sebuah langkah penting bagi negara, yang dikaitkan dengan implementasi hukum internasional. Pada kenyataannya pengakuan oleh sebuah negara merdeka lebih banyak dilandasi alasan politik.

Tujuan utama suatu negara mengadakan hubungan diplomasi adalah mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain, menjaga hubungan dengan negara lain dan menjaga keserasian antar negara. Diplomasi pada hakekatnya merupakan cara-cara dimana negara melalui wakil-wakil resmi maupun wakil-wakil lainnya termasuk juga para pelaku-pelaku lainnya membicarakan dengan baik, mengkoordinasikan dan menjamin kepentingan-kepentingan tertentu atau

yang lebih luas melalui surat menyurat, pembicaraan secara pribadi, dengan mengadakan pertukaran perdagangan, pendekatan, kunjungan-kunjungan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan lainnya (Suryokusumo, 2004:34).

2.1.3.1 *Soft – Power Diplomacy*

Soft diplomacy merupakan istilah yang berkembang seiring semakin ditinggalkannya penggunaan hard power yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai kepentingannya. Melalui *soft diplomacy*, negara berusaha untuk memikat atau mempengaruhi negara lain dan masyarakatnya dengan kebudayaan yang dimiliki dan nilai-nilai yang dianutnya dengan cara-cara yang soft secara persuasif. Karena itu, *soft diplomacy* merujuk kepada penggunaan kekuatan lunak (*soft power*) sebagai instrumen diplomasi dibanding hard power yang berbasis kapabilitas militer (Rijal, 2017 : 6).

Seiring pergeseran dan perluasan dimensi keamanan dari keamanan tradisional ke keamanan nontradisional, dewasa ini semakin banyak negara lebih mengedepankan diplomasi non-konvensional, yakni melalui elemen *soft- power* seperti produk budaya, film, musik, dan lainnya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Implementasi *soft diplomacy* tersebut dianggap membutuhkan biaya yang relatif lebih murah dibanding dengan diplomasi konvensional.

Menurut Joseph S. Nye, JR mengenai *soft power* dalam bukunya *Soft Power: The Means to Success in World Politics* bahwa "*Soft power* merupakan kemampuan suatu negara untuk membentuk pola pikir negara lain supaya

cenderung mengikuti apa yang diinginkan oleh negara pelaku *soft power* tersebut (Nye, 2004:5).

Kegiatan diplomasi kekinian mulai dijalankan dengan mengedepankan unsur soft power yang dimiliki oleh suatu negara yakni melalui *soft diplomacy*. Munculnya kecenderungan penggunaan *soft power* dalam berdiplomasi juga ditunjang karena pesatnya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi (Jemadu, 2008:118).

Melalui *soft diplomacy*, negara berusaha sedapat mungkin untuk memikat negara lain sekaligus masyarakat yang ada di dalamnya dengan kebudayaan yang dimiliki dan nilai-nilai yang dianutnya. Aktifitas *soft diplomacy* dapat mengarahkan berbagai kedekatan politik menjadi kemanfaatan ekonomi seperti melalui promosi perdagangan dan membantu tugas promosi pariwisata. Maka dari itu, adapun senjata utama dalam pelaksanaan *soft diplomacy* yakni dengan menggunakan media dalam suatu event untuk berhubungan dan berinteraksi dalam memberi informasi baik itu untuk mendidik ataupun untuk menghibur dengan menempatkan budaya, nilai dan kebijakan suatu bangsa (Scott, 2009).

2.1.3.1 Diplomasi Publik

Perkembangan diplomasi dibagi menjadi dua yaitu diplomasi tradisional dan diplomasi modern. Pada saat ini diplomasi modern lebih banyak digunakan dibandingkan dengan diplomasi tradisional karena saat ini perkembangan dunia semakin kompleks dan yang terlibat bukan hanya negara saja melainkan sudah melibatkan aktor-aktor non negara seperti individu, kelompok, organisasi baik itu

organisasi nasional maupun internasional. Ditambah dengan saat ini negara bukan hanya bersaing kredibilitas dengan negara lain, namun juga dengan media massa, *corporation*, *NGO*, *IGO*, dan berbagai kelompok kepentingan yang ada (Nye, 2004 : 106).

Mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor yang sangat penting yang berpengaruh terhadap perkembangan diplomasi adalah revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Kecepatan dan kemudahan transportasi dan komunikasi telah mengurangi peranan diplomat. Perkembangan media elektronik dan teknologi informasi telah mengurangi pentingnya diplomat dalam mengumpulkan informasi, dan dalam kecepatan mengambil keputusan bereaksi secara segera terhadap peristiwa internasional melalui saluran diplomasi tradisional (Carlsnaes, 2002 : 215-217).

Diplomasi publik dimaknai sebagai sebuah proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional dan kebijakan -kebijakan yang diambil oleh negaranya. Jay Wang (2006) melihat diplomasi publik sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. (Gouveia, 2006:7-8)

Jan Mellisen berpendapat bahwa diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara.

Berdasarkan semua definisi itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri. Karenanya, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen *soft power*.

Diplomasi Publik termasuk ke dalam *soft diplomacy*, dimana diplomasi ini dilakukan untuk membentuk citra positif suatu negara di mata publik internasional dengan memikat warga negara lain untuk membuat negaranya semakin dikenal. Dalam pelaksanaannya, diplomasi publik ini menggunakan alat bantu perangkat lunak maupun cetak yang dijalankan baik itu oleh media, lembaga, individu atau publik secara luas (Emilia, 2013 : 81).

Mark Leornad menjelaskan bahwa di dalam diplomasi publik terdapat sebuah hubungan antara *image* dan *issue*. Setiap negara memiliki isu-isu yang berbeda yang berkembang di negaranya. Pada umumnya isu-isu tersebut dapat mempengaruhi pada hubungan suatu negara dengan lingkungan domestik maupun lingkungan internasional (Leonard. 2002 : 8).

Mark Leonard juga menilai bahwa terdapat empat tujuan yang dapat dicapai dengan adanya diplomasi publik. Pertama, meningkatkan rasa kekeluargaan dengan negara lain, dengan cara membuat mereka memikirkan negara lain, memiliki citra yang baik terhadap suatu negara. Kedua, meningkatkan penghargaan masyarakat kepada negara tertentu, seperti mempunyai persepsi yang positif. Ketiga, mengeratkan hubungan dengan masyarakat di suatu negara, contohnya dengan cara pendidikan ke dalam kerja sama ilmiah, meyakinkan masyarakat di suatu negara untuk mendatangi tempat-tempat wisata, menjadi

konsumen produk buatan lokal, pemberi pengetahuan mengenai nilai-nilai yang dijunjung oleh aktor. Keempat, mempengaruhi masyarakat di negara lain untuk berinvestasi, dan menjadi *partner* dalam hubungan politik (Leonard, 2002 : 9).

Diplomasi publik biasanya melakukan sebuah upaya dengan cara membentuk suatu jaringan komunikasi sebagai wadah promosi hingga ke luar negeri, karena komunikasi internasional pada umumnya memanfaatkan komunikasi massa yang tersebar luas dan memiliki sebuah struktur jaringan komunikasi tertentu (Shoelhi, 2012 : 3).

Dalam prakteknya diplomasi publik tidak selalu berjalan dengan mulus, Nye menyebut hal itu dengan '*paradox of plenty*' yang dapat dijelaskan menjadi 4 hal. Satu, perlu untuk mengetahui bagaimana persepsi dan sikap publik global terhadap suatu negara mengingat pasca Perang Dingin banyak terjadinya suatu realiansi politik dan ekonomi. Dua, transparansi media komunikasi yang menjadikan kelompok sasaran menjadi tidak terbatas hanya pada satu negara saja melainkan pada tataran global. Tiga, menurunnya suatu kredibilitas pesan yang ada dalam suatu proses diplomasi publik. Masyarakat cenderung menilai apa yang dikomunikasikan oleh pemerintah adalah sebagai bentuk propaganda. Terakhir yang keempat, munculnya banyak saluran komunikasi yang membutuhkan pininjauan ulang terhadap model komunikasi apa yang harus digunakan (Nye, 2004 : 107)

Nye juga menyebutkan bahwa diplomasi publik memiliki tiga dimensi didalamnya. Pertama, sebuah komunikasi harian yang melibatkan suatu penjelasan bagaimana konteks keputusan kebijakan dalam maupun luar negeri.

Dalam dunia internet yang memiliki informasi yang sangat banyak dimensi ini adalah hal yang penting dalam posisi pemerintah untuk menekankan dan menjelaskan bagaimana persiapan dalam menghadapi krisis dimana komunikasi yang diberikan pemerintah diharapkan menjadi yang utama dibandingkan dengan informasi yang muncul bersaing dengan nilai-nilai negara. Dimensi yang kedua adalah komunikasi strategis yang mengembangkan suatu tema sederhana yang ada dalam sebuah kampanye politik atau iklan. Kampanye ini mencanangkan acara simbolis atau komunikasi tematis pada sepanjang tahun tertentu untuk menciptakan merek dari tema sentral atau untuk meningkatkan kebijakan tertentu dari pemerintah. Dimensi ketiga dari diplomasi publik menurut Nye adalah menciptakan sebuah hubungan jangka panjang dengan tokoh-tokoh kunci seamaa bertahun-tahun baik itu melalui beasiswa, pertukaran, pelantikan, seminiar, konperensi, maupun akses terhadap media (Nye, 2004 : 107-111).

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah melalui penggunaan diplomasi publik, pemerintah tidak bisa melakukan diplomasi publik hanya melalui satu proses dimensi saja. Namun diperlukan ketiga proses dimensi diplomasi tersebut dalam menyampaikan pesan yang ingin dibawa oleh pemerintah. Ketiga dimensi diplomasi publik ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pembentukan *image* suatu negara yang dapat digunakan dalam meningkatkan prospek untuk memperoleh hasil yang diinginkan (Nye, 2004 : 107).

Diplomasi publik memiliki ciri sebagai kelompok bukan pemerintah, bentuknya yang informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan,

menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan saling ketergantungan di antara para pihak. Meski diplomasi tradisional telah gagal, diplomasi publik tidak lantas menggantikan diplomasi jalur pertama itu, tetapi melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional. Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antar pemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor negara dan non-negara yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah. Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri yang biasa disebut diplomasi multijalur atau *Multi-track Diplomacy*. *Multi-track Diplomacy* pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja konseptual dalam memandang proses perwujudan perdamaian internasional sebagai sebuah sistem kehidupan yang ideal. Semuanya tercakup dalam sebuah model jaringjaring yang saling terkait antara individual, institusi dan komunitas yang bekerja bersama untuk satu tujuan tunggal yaitu perdamaian dunia. Konsep mengenai *Multi-Track Diplomacy* sebenarnya adalah sebuah ekspansi dari paradigma *Track One (Government)* dan *Track Two (Non Government)* yang telah membentuk kajian bidang ini dalam beberapa dekade terakhir. Dalam perkembangan sejarahnya, konsep mengenai kedua jalur ini berawal dari sebuah kesadaran bahwa tidak selamanya sebuah interaksi formal, resmi dan antar-pemerintah diantara perwakilan yang ditugaskan oleh Negara berdaulat masing-masing merupakan metode yang efektif dalam mencapai kerjasama internasional

yang mutualistik ataupun menyelesaikan sebuah konflik atau perbedaan. Bahkan Warga Negara biasa dari berbagai macam latar belakang dan keahlian bisa menghadirkan sesuatu yang kredibel dan dapat membuat suatu perubahan (Djelantik, 2004 : 352-365).

Dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut. Pertama, faktor eksternal misalnya terdiri dari struktur sistem internasional, karakteristik ekonomi dunia, kebijakan dan tindakan aktor lain, permasalahan global dan regional yang diakibatkan oleh aktivitas swasta, serta hukum dan opini internasional. Kedua, faktor internal yang berasal dari dalam negeri misalnya kebutuhan sosio-ekonomi dan keamanan, karakteristik topografi dan geografis, atribut nasional negara, struktur dan filosofi pemerintah, opini publik, birokrasi, dan pertimbangan etis. Dalam mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan nasional, berbagai sarana digunakan sebagai instrumen yang direfleksikan oleh kebijakan luar negeri. Diplomasi sendiri di sini adalah instrument yang digunakan oleh aktor internasional, terutama negara, untuk menerapkan kebijakan luar negerinya. Interaksi antara olahraga dan diplomasi bukanlah sesuatu yang baru. Secara historis, olahraga dan diplomasi sangat berkaitan seperti yang dicontohkan oleh festival Olimpiade kuno di kota-kota Yunani yang dipandang sebagai "kendaraan untuk menyatukan dunia yang beradab terlepas dari perbedaan politik" (Goldberg, 2000 : 63-70).

Pada zaman modern, tim olahraga nasional telah digunakan sebagai alat diplomasi bagi sebuah negara sebagai perwakilan atau representasi untuk negara mereka atau sebagai sinyal protes (Faizullaev, 2013 : 91-114).

Sejak masa olimpiade kuno pertama, olah raga sudah dijadikan sebagai alat untuk menyatukan bangsa-bangsa walaupun terdapat perbedaan politik. Bahkan dalam piagam olimpiade terdapat suatu keinginan untuk berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih baik dan damai.

Meski dikatakan olahraga harus terbebas dari politik, pada prakteknya ada saja kegiatan olahraga yang memiliki tujuan atau dipengaruhi oleh politik. Contohnya seperti bagaimana konflik politik telah lama muncul dalam olah raga, seperti komunisme melawan kapitalisme yang kental saat perang dingin. Ideologi di dalam kompetisi atletik ini paling jelas terlihat pada era Perang Dingin, Perang Dingin memberikan pelajaran bagaimana olahraga dapat merepresentasikan kompetisi yang melampaui arena bermain, menjadi forum untuk menunjukkan ketidaksetujuan sebagaimana mendemonstrasikan dan memvalidasi kepercayaan (Goldberg, 2000 : 64-65).

Banyak sekali hal yang dapat diterapkan pada diplomasi publik, salah satunya adalah melalui acara olahraga berskala internasional. Olahraga telah menjadi sebuah kegiatan yang dicintai oleh hampir semua orang, selain itu olahraga memiliki daya tarik yang cukup tinggi terhadap masyarakat luas. Penyelenggaraan suatu *event* olahraga berskala internasional juga dapat digunakan sebagai media diplomasi publik oleh suatu negara. Hal ini dikarenakan aktor yang terlibat bukan hanya negara saja, namun juga melibatkan aktor-aktor lain dan berbagai organisasi olahraga yang berkaitan dengan pemerintah (Stuart, 2012 : 18).

2.1.3.3 *Digital Diplomacy*

Diplomasi digital mengarah kepada penggunaan website, teknologi komunikasi dan informasi, dan media sosial yang dilakukan negara untuk tujuan aktivitas diplomasi, kebijakan luar negeri ataupun permasalahan dalam kebijakan luar negeri (Sandre, 2013:9).

Menurut Marcus Holmes, diplomasi digital merupakan strategi dalam mengelola perubahan melalui alat digital dan kolaborasi virtual, yang secara spesifik mengarah kepada teknologi komunikasi dan informasi serta komunitas online yang bergerak dari bawah ke atas (*bottom-up*) dalam kondisi tertentu. Dalam prakteknya diplomasi digital digunakan untuk menjangkau masyarakat, perusahaan, ataupun aktor non-negara lainnya (Bjola, 2015: 38). Diplomasi digital juga telah memberikan bantuan untuk kepentingan negara dalam hal pembuatan, penyebaran, dan pemeliharaan pengetahuan dan informasi melalui teknologi komunikasi dan informasi.

Dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi saat ini seperti trend penggunaan media sosial seperti Twitter, Facebook dan yang lainnya telah memaksa para diplomat dan praktisi di bidang komunikasi untuk berpikir dan mendesain ulang diplomasi dalam konteks yang berbeda. Mereka mencoba untuk memperluas jangkauan mereka dan mengeksplor lebih jauh cara-cara inovatif baru untuk menyatukan upaya mereka dalam arena internasional (Sandre, 2013:11).

Diplomasi digital bisa berkontribusi lebih baik bagi strategi kebijakan luar negeri, baik dilevel bilateral maupun multilateral, dan bagaimana diplomasi tradisional bisa dilengkapi oleh perangkat baru (<https://www.diplomacy>).

edu/blog/twitter-diplomats-guide-fastest-growing-digital-diplomacy-tool diakses pada tanggal 21 Mei 2019).

Dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial, bukan hanya berkontribusi dalam politik internasional dan aktivitas sosial, tetapi juga mencakup upaya dunia internasional dalam menyelesaikan isu-isu pemerintahan global, menghubungkan tiap individu dan aktor non negara (Funk, 2013:10). Terlebih dengan munculnya internet yang membuat hal tersebut menjadi semakin murah, praktis dan mencakup wilayah yang luas.

Dalam penelitian ini digital *diplomacy* sangat berperan penting dalam mempromosikan pelaksanaan Asian Games 2018 terhadap masyarakat, baik itu masyarakat dalam negeri maupun luar negeri contohnya penyebaran iklan di berbagai media sosial.

2.1.4 Pariwisata

Dalam arti luas pariwisata memiliki artian suatu kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau untuk mencari suasana lain (Damanik dan Weber, 2006). Menurut Mathieson dan Wall Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan seseorang dari tempat tinggal atau tempat kerjanya ke tempat lain serta melakukan kegiatan selama berada ditempat tujuan dan juga untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan.

Pariwisata muncul sebagai suatu andalan dalam perokonomian masyarakat dunia. Dalam sebuah jurnal yang berjudul “Pariwisata, Pengentasan Kemiskinan dan MDG’s” dijelaskan bahwa industry pariwisata merupakan sebuah jantung

penggerak roda perekonomian dan juga menjadi salah sektor andalan dalam pembangunan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan (Wahyudi, 2012).

Pariwisata merupakan sektor strategis yang dapat meningkatkan devisa negara dan memberikan implikasi yang signifikan bagi perekonomian negara karena banyaknya *benefit* yang dihasilkan sektor pariwisata tersebut.

Badrudin (2001) mendefinisikan pariwisata sebagai sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan dilakukan perorangan maupun kelompok sebagai sebuah usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Sebagai sebuah antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang telah mendunia, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Undang-Undang No.10 tahun 2009 yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata yang terdiri atas tujuh belas bab dan tujuh puluh pasal yang mengandung ketentuan meliputi delapan hal, yaitu :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata (Undang-Undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata)

Pariwisata dapat memotivasi beberapa aktor untuk mempromosikan kerjasama dan kemitraan dalam tingkat nasional dan internasional. Dampak yang disebabkan oleh pariwisata beragam. Negara merupakan aktor paling penting

dalam membangun industri pariwisata dengan memperhitungkan kepentingan politik, ekonomi hingga kepentingan kebudayaan.

Dalam Hubungan Internasional Pariwisata dikenal setelah berakhirnya perang dingin sebagai salah satu dari upaya *soft diplomacy*. Pariwisata kini telah berkembang secara global dan berubah menjadi sebuah industri yang menjanjikan namun juga berisiko, paling tidak kini pariwisata telah menjadi kepentingan bagi perekonomian sebuah negara.

2.2 Kerangka Pemikiran

Diplomasi kini sudah berkembang dengan beragam cara, salah satunya melalui olahraga. Dalam era globalisasi kini pariwisata juga telah menjadi hal yang penting dalam sebuah negara untuk mendorong perekonomian negara maka dari itu kini setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan sektor pariwisatanya melalui beragam promosi yang dilakukan. Era globalisasi saat ini menuntut negara-negara untuk mengikuti arus teknologi dan informasi yang sudah berkembang dan mulai meningkatkan kemampuan diplomasinya dari berbagai aspek, hal ini ditandai dengan perubahan isu-isu hubungan internasional pasca perang dingin yang awalnya cenderung kepada isu politik dan keamanan menjadi isu HAM, sosial, lingkungan hidup, hingga pariwisata seperti yang diungkapkan (Perwita dan Yani,2005:7).

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, tergantung dengan kondisi yang dialaminya. Indonesia memiliki kepentingan

nasional dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 yang diselenggarakan di negaranya salah satunya untuk meningkatkan sektor pariwisata.

Indonesia melalui Asian Games 2018 berusaha meyakinkan para wisatawan mancanegara bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat indah dan dapat dinikmati sebagai salah satu tujuan untuk pariwisata. Upaya penyampaian pesan melalui diplomasi publik ini bertujuan untuk dapat mempengaruhi masyarakat internasional sebagaimana yang diungkapkan oleh (Susetyo dalam Shoelhi, 2011 : 158).

Pariwisata menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi Indonesia dapat dilihat dari banyaknya masyarakat mancanegara yang berkunjung ke Indonesia baik untuk melakukan kegiatan wisata maupun untuk membantu membangun perekonomian Indonesia. Asian Games merupakan sebuah *event* olahraga terbesar di Asia yang melibatkan hampir seluruh negara di Asia, hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Indonesia melalui diplomasi publik untuk meningkatkan sektor pariwisata di negaranya dimana Indonesia diberikan kesempatan sebagai tuan rumah penyelenggara Asian Games-18. Akibat dari besarnya minat orang-orang untuk mendukung tim favoritnya atau hanya sekedar menonton pertandingannya, hal ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pariwisata negara yang menjadi tuan rumah dengan datangnya para wisatawan mancanegara seperti yang diungkapkan oleh (Soekadijo, 2000 : 30).



Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran